

Received: April 2019

Accepted: May 2019

Published : June 2019

## ISLAM NUSANTARA DAN SPIRIT PLURALISME SEBAGAI MODAL KARAKTER BANGSA

**Agus Salim**  
**Abdur Rofik**

Universitas Islam Raden Rahmat Malang  
E-mail: [asalim.nahid@gmail.com](mailto:asalim.nahid@gmail.com)

**Abstrak:** Islam Nusantara dan Pluralisme sering kali diasumsikan sebagai konsep yang dianggap paradoksal, padahal Islam Nusantara bukanlah sebuah aliran (*madzhab*) apalagi sebagai agama baru, akan tetapi sebagai ciri khas atau karakteristik (*khasai*) keislaman yang mengakomodir adat-istiadat dan budaya lokal (*local wisdom*) yang menjadi pembeda dari ideologi Islam yang ada di belahan negara-negara timur tengah, yang cenderung kaku dan menolak tradisi lokal. Begitu juga pluralisme (budaya) merupakan sebuah konsep yang menerangkan ideal (ideologi) kesetaraan kekuasaan dalam suatu masyarakat multikultur, di mana kekuasaan "terbagi secara merata" di antara kelompok-kelompok etnik yang bervariasi sehingga mendorong pengaruh timbal balik di antara mereka. Dan dalam masyarakat multikultur tersebut, kelompok-kelompok etnik itu dapat menikmati hak-hak mereka yang sama dan seimbang, dapat memelihara dan melindungi diri mereka sendiri karena mereka menjalankan tradisi kebudayaannya.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat plural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudayaan, kemasyarakatan dan kepribadian.

*Kompetensi kebudayaan* adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsensus mengenai sesuatu. *Kompetensi kemasyarakatan* merupakan tatanan-tatanan syah yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membentuk solidaritas sejati. *Kompetensi kepribadian* adalah kompetensi yang memungkinkan seorang subjek dapat berbicara dan bertindak dan karenanya mampu berpartisipasi dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks tertentu dan mampu memelihara jati dirinya sendiri dalam berbagai perubahan interaksi.

Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh, beranekaragam budaya, etnik, suku, ras dan agama, yang kesemuanya itu akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu mengakomodasi kemajemukan itu menjadi suatu yang tangguh. Sehingga ancaman disintegrasi dan perpecahan bangsa dapat dihindari.

**Kata Kunci:** Islam Nusantara dan Pluralisme, Budaya dan Karakter Bangsa.

## Pendahuluan

Globalisasi informasi dan industrialisasi digital membawa dampak terhadap perkembangan pembangunan peradaban dunia dan nasional negara-negara berkembang, tak terkecuali terhadap peradaban di negara Indonesia juga telah terimbas *side effect* dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan masyarakat. Prinsip globalisasi, globalisasi tidak bisa kita bendung dikarenakan persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan arus globalisasi tersebut. Globalisasi tidak perlu kita risaukan apalagi ditakuti apabila kita mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan/atau buruk yang dibawanya. Manusia cerdas hendaknya memilah-milah apa yang baik dan apa yang buruk, yang dibawa oleh gelombang globalisasi tersebut.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, Sampang-Madura, bom Bali, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah di Jawa Barat, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat

memungkinkan memicu terjadinya disintegrasi bangsa,

Untuk itu, upaya rekonsiliasi, rekonstruksi, dan revitalisasi nilai-nilai agama dan budayanya dipandang sangat urgen sebagai salah satu terobosan baru yang strategis dalam sistem sosial, budaya, dan baru bahkan pendidikan di Indonesiam terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi di lingkungan masyarakat.

## Pembahasan

### Landasan Konseptual Islam Nusantara

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Pemaknaan kata Islam termaktub dalam sejumlah ayat Al-Quran diantaranya: *Pertama*, Islam berasal dari kata "*as-silmu*" yang berarti damai, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١

Artinya: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (QS. Al-Anfal:61).

*Kedua*, Islam berasal dari kata "*aslama*" yang berarti menyerahkan diri (pasrah), sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ  
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا  
١٢٥

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya" (QS. An-Nisa:125).

*Ketiga*, Islam berasal dari kata "*istaslama-mustaslama*" yang berarti penyerahan total kepada Allah, sebagaimana firman-Nya:

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦

Artinya: "Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri" (QS. Ash-Shaffat:26 )

Keempat, Islam berasal dari kata "*saliimun salim*" yang berarti bersih dan suci, sebagaimana firman Allah:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٩

Artinya: "Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih" (QS. Asy-Syu ' ara:89).

*Kelima*, Islam berasal dari kata "*salamun*" yang artinya selamat, sebagaimana firman Allah:

قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا  
٤٧

Artinya: "Berkata *Ibrahim*: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku" (QS. Maryam:47).

Pengertian Islam menurut Al-Qur'an tersebut sudah cukup jelas bahwa Islam mengandung pesan bahwa kaum Muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah SWT, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia-akhirat jika melaksanakan risalah Islam.

الإسلام هو دين الله الذي اوصى بتعاليمه في  
اصوله وشرائعه الى النبي محمد صلى الله عليه  
وسلم وكلفه بتبليغه للناس كافة

"Islam adalah agama Allah yang berisi pokok-pokok dan peraturan-peraturan bagi seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dan dibebankan untuk menyampaikan dan mengajak mereka memeluknya". (Mahmud Syaltut; Islam aqidatu wa Syariatun)

Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa untuk mampu memaknai segala perbuatannya bernilai ibadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا  
إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

Artinya: "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku".

Sementara itu, kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta/bahasa Kawi, yang terdiri dari dua kata : Nusa, yang berarti pulau, tanah air. Antara, yang berarti jarak, sela, selang, di tengah-tengah dua benda. Dengan demikian, Nusantara adalah pulau-pulau yang terbentang di antara dua benua, Benua Asia dan Australia, diapit oleh dua lautan, yaitu lautan India dan lautan Pasifik. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2014 adalah 17.504 pulau, 7.870 diantaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 pulau belum memiliki nama (<http://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>, diakses tanggal 19 Maret 2018). Sebutan lain dari Nusantara sebagai Benua Kepulauan adalah Benua Bahari/Maritim yang jaraknya antara barat dan timur kurang lebih 5.110 km, dari utara ke selatan 1.888 km. Luas seluruh daratannya mencapai 1.919.443 km<sup>2</sup>, sedang luas lautannya mencapai 5.110 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai seluruhnya mencapai 81.000 km. Begitu pula jumlah penduduk 261,1 juta (2016).

Secara historis, penamaan Nusantara pertama kali digunakan oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara (1889-1959), pendiri Taman Siswa yang sekaligus pejuang

kemerdekaan.<sup>1</sup> Sedangkan nama Indonesia mulai digunakan sejak lima tahun sebelum nama Nusantara (1884), dipopulerkan oleh sanjana Jerman Adolf Bastian dari Universitas Berlin untuk menunjuk gagasan gugusan Kepulauan Melayu, tetapi Indonesia sebagai nama sebuah bangsa baru muncul tahun 1920-an di kalangan Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda. Semula tidak semua tokoh pergerakan nasional merasa nyaman dengan nama itu, tetapi suara mayoritas dalam PI kemudian telah menetapkannya sebagai nama sebuah bangsa yang baru lahir, sekalipun sebutan Nusantara masih dipakai juga untuk maksud yang sama, bahkan sampai sekarang. Artinya penamaan Nusantara diidentikkan dengan sebutan Indonesia.<sup>2</sup>

### **Penamaan dan Studi Historis Islam Nusantara**

Kajian Islam Nusantara, merupakan kajian terhadap tata nilai Islam yang ada di kawasan Nusantara, bukan lagi sekedar kajian terhadap geografi kawasan Islam yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Peradaban yang dikembangkan oleh para wali dan ulama' sepanjang sejarah, mulai dari Samudra Pasai, Jawa, Malaka, Palembang, Banten, Kalimantan Barat, Bugis, Ternate, Tidore, dan Maluku.

Mengaji Islam Nusantara dengan menggunakan perspektif kawasan ini diharapkan mampu memiliki keunggulan di bidang akurasi (ketepatan) serta *profonditas* (kedalaman). Dengan demikian akan memperoleh dan memiliki otoritas (kewenangan) yang lebih tinggi di banding pengkaji yang lain. Nusantara menjadi penting dan relevan baik dalam konteks geopolitik atau geokultural dalam percaturan politik global dewasa ini, sehingga pengembangan kajian Nusantara saat ini menjadi sangat urgen.

Nusantara dalam perpektif ini bukanlah hanya konsep geografis (kawasan) yang terbentang antara Benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Lebih jauh dari itu Nusantara merupakan *encounter culture* (pusat pertemuan budaya) dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari budaya Arab, India, Turki, Persia, Cina termasuk dari budaya Barat, sehingga melahirkan budaya dan tata nilai yang sangat khas. Oleh karena itu, Nusantara bukan sebuah konsep geografis (kawasan) melainkan sebuah konsep filosofis dan menjadi perspektif (wawasan) sebuah pola pikir, tata nilai dan cara pandang dalam melihat dan menghadapi berbagai budaya yang datang.

Islam yang datang ke Nusantara merupakan Islam yang sudah paripurna karena telah mengalami dialog intensif dengan berbagai peradaban besar dunia seperti Persia, Turki,

India, Cina Siam dan sebagainya. Sehingga ketika sampai di Nusantaratelah tampil dalam kondisi yang paling paripurna. Islam model itulah yang kemudian di ajarkan di berbagai pesantren, padepokan dan sebagainya. Baru kemudian di kukuhkan oleh para wali dan para ulama dalam konteks budaya Nusantara. Prinsip islam itulah yang kemudian di kukuhkan sebagai basis pengembangan budaya, Kesusasteraan, teknologi dan termasuk dijadikan sumber serta rujukan dalam merumuskan system politik kenegaraan, sehingga muncul berbagai kerajaan Islam yang memiliki konstitusi yang unggul sepadan dengan Negara lain yang lebih maju.

Walaupun Islam yang masuk ke Nusantara telah berdialoog dan bergumul dengan berbagai budaya besar dunia, tetapi otentisitas serta kemurniannya tetap terjaga. Apalagi dalam tradisi Islam Ahlussunnah wal jama'ah yang berkembang di Nusantara ini, *sanad* atau ketersambungan mata rantai ilmu itu merupakan syarat dan rukun dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersambungan *sanad* itu ikut menentukan integritas keilmuan itu sendiri. Dengan demikian kemurnian dan kebenarannya tetap terjaga. Apalagi yang mengembangkannya adalah para ulama yang memiliki kecintaan pada ilmu yang tinggi, memiliki keikhlasan serta integritas moralnya sangat terjaga.

Oleh karena itu, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai

teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di wilayah Indonesia. Kehadiran Islam tidak untuk merusak atau menantang tradisi yang ada. Sebaliknya, Islam datang untuk memperkaya dan mengislamkan tradisi dan budaya yang ada secara *tadriji* (bertahap). Bisa jadi butuh waktu puluhan tahun atau beberapa generasi. Pertemuan Islam dengan adat istiadat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan (seperti pesantren) serta sistem kesultanan.<sup>3</sup> Tradisi itulah yang kemudian disebut dengan Islam Nusantara, yakni Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya lokal Nusantara.

Pemahaman tentang formulasi Islam Nusantara menjadi penting untuk memetakan identitas Islam di negeri ini. Islam Nusantara dimaksudkan sebuah pemahaman keislaman yang bergumul, berdialog dan menyatu dengan kebudayaan Nusantara, dengan melalui proses seleksi, akulturasi dan adaptasi.<sup>4</sup> Islam Nusantara tidak hanya terbatas pada sejarah atau lokalitas Islam di tanah Jawa. Lebih dari itu, Islam Nusantara sebagai *manhaj* atau model beragama yang harus senantiasa diperjuangkan untuk masa depan peradaban Indonesia dan dunia.<sup>5</sup>

Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara. Islam agama yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, sub kultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima orang Nusantara, tetapi juga pantas mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya yaitu *rahmatan lil 'alamin*.

Islam Nusantara sangat dibutuhkan, karena ciri khasnya mengedepankan jalan tengah atau bersifat *tawasuth* (moderat), tidak ekstrim kanan maupun kiri, selalu seimbang, inklusif, toleran, dan bisa hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, serta bisa menerima demokrasi dengan baik. Model Islam Nusantara itu bisa dilacak dari sejarah kedatangan ajaran Islam ke wilayah Nusantara yang disebutnya melalui proses *vernakularisasi* dan diikuti proses pribumisasi, sehingga Islam menjadi *embedded* (tertanam) dalam budaya Indonesia (Azyumardi Azra; 2-15). Oleh karena itu, sudah selayaknya Islam Nusantara dijadikan alternatif untuk membangun peradaban dunia Islam yang damai dan penuh harmoni di negeri mana pun, namun tidak harus bernama dan berbentuk seperti Islam Nusantara, karena dalam Islam Nusantara tidak mengenal menusanterakan Islam atau nusantaraisasi budaya lain.

Dalam konteks ini, budaya suatu daerah atau negara tertentu menempati posisi yang setara dengan budaya Arab dalam menyerap dan menjalankan ajaran Islam. Suatu tradisi Islam Nusantara menunjukkan suatu tradisi Islam dari berbagai di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut. Dengan demikian budayaisian, corak Islam Nusantara tidaklah homogen, karena satu daerah dengan daerah lainnya memiliki ciri khasnya masing-masing tetapi memiliki napas yang sama. Kesamaan napas merupakan saripati dan hikmah dari perjalanan panjang Islam berabad-abad di Nusantara yang telah menghasilkan suatu karakteristik Islam Nusantara yang lebih mengedepankan aspek esoteris hakikat ketimbang eksoteris syariat.

Dalam membangun karakteristik Islam Nusantara, peran penyebar masuknya Islam di Nusantara seperti Walisongo cukup dominan dalam pembentukan kultur Islam Nusantara. Para Wali yang merupakan gabungan antara ahli syari'ah dan tasawuf ini telah mengembangkan Islam ramah yang bersifat kultural. Sifat kultural ini bisa terbentuk, karena penekanan para wali atas substansi Islam yang akhirnya bisa membumi ke dalam bentuk budaya keagamaan lokal pra Islam. Proses ini yang oleh KH. Abdurrahman Wahid disebut sebagai "pribumisasi Islam", dimana ajaran Islam disampaikan dengan meminjam "bentuk budaya" lokal. Pribumisasi Islam ala Walisongo

mengajarkan toleransi, substansi dan kesadaran kebudayaan dalam dakwah Islam. Pola pribumisasi Islam inilah yang akhirnya membentuk perwujudan kultural Islam. Sebuah perwujudan keislaman yang bersifat kultural yang merupakan pertemuan antara nilai-nilai normatif Islam dengan tradisi lokal.

Perwujudan kultural ala Walisongo ini kemudian mencapai titik paripurna dalam pesantren. Hal ini tidak lepas dari jaringan ulama Nusantara pada abad-abad setelahnya yang menggambarkan proses kesinambungan yang terus berproses menyempurnakan. Proses tersebut mengalami persilangan lintas kultur, dengan transmisi keilmuan, jaringan ulama dan interaksi kebudayaan. Persilangan lintas kultural antara kawasan Nusantara dengan Arab, Yaman, Haramain, Ottoman dan kawasan Asia tengah menjadi titik penting untuk melihat bagaimana penyerbukan lintas budaya terjadi. Islam Nusantara lahir dari interaksi antarbudaya yang menghasilkan harmoni dalam tradisi, ritual, dan pemahaman konsep-konsepnya. Islam di Nusantara tidak berangkat dari kekerasan, namun dari cara-cara perdamaian untuk meresap di hati.

Masuknya islam ke Nusantara memberikan dampak yang tentunya positif dan ada pula negatif. Pada dasarnya, Islamisasi nusantara memberikan pencerahan kepada masyarakat nusantara tentang perdamaian dan persatuan. Islam sebagai agama yang

universal dan mencintai perdamaian tentunya memberikan dampak pada bersatunya umat islam di seluruh nusantara untuk melawan penjajahan. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari bersatunya umat Islam untuk melawan kolonialisme yang ada di bumi pertiwi ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari bersatunya para pemeluk agama islam dan toleransi terhadap agama lain untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dampak negative dari islamisasi nusantara adalah terjebaknya masyarakat nusantara dalam hal-hal yang berbau mistik, seperti ritual dan sesajen. Islam memasuki ranah budaya dalam rangka melakukan pendekatan terhadap polapikir masyarakat terhadap islam. Islam memasuki ranah budaya dan menyesuaikan kebudayaan tersebut sesuai dengan tuntunan dalam sumber hukum islam, yaitu Al-Quran dan Hadits, sehingga islam yang berkembang di Nusantara dapat dikatakan sebagai islam budaya. Hal ini tentunya didasarkan pada universalitas islam yang memberikan ruang kepada budaya local untuk tetap berkembang, tetapi tidak menyalahi aturan hukum islam. Sebagai contoh, pelaksanaan berbagai upacara adat dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW pada Rabiul Awal misalnya, merupakan upacara bernafaskan islam yang tidak ada ditemukan di kebudayaan Arab. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa kebudayaan yang berkembang di Nusantara telah berakulturasi dengan kebudayaan islam, sehingga tidak menyalahi aturan hokum islam sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Hadits.

### **Konsep Pluralisme dan Multikulturalisme**

Secara bahasa pluralisme berasal dari kata plural yang berarti majmuk/jamak dan multikultural dari kata multi + cultural yang berarti multi kebudayaan/peradaban. Dalam Oxpord Advanced Learner's Dictionary, istilah pluralisme diartikan: *"pluralism is the existence of many different group in one society, for example people of different races or of different political or religious beliefs: cultural or political pluralism"*.<sup>6</sup>

Pluralisme adalah paham/isme tentang pluralitas, yakni kesadaran akan realitas keragaman kehidupan masyarakat dalam aspek budaya, sosial, politik, ekonomi, ideologi, agama, dan lainnya. Pluralisme, saat ini, lebih bermakna kesadaran terhadap kenyataan adanya keragaman agama yang dianut oleh manusia di dunia dan oleh karenanya tidak perlu terjadi adanya sikap menyalahkan terhadap orang lain yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Pluralisme dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.<sup>7</sup> Oleh karena itu, Para pakar, secara prinsip, tidak membedakan istilah pluralisme dan multikultural. Keduanya digunakan secara sama,

mereka terkadang menyebut pluralisme dan terkadang menyebut multikulturalisme.

### Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Islam.

Islam sebagai sumber hukum telah memberikan dasar dan landasan terhadap pluralisme dan multikulturalisme secara konkrit. Hal ini sebagaimana anuran dalam al-quran untuk membangun interaksi dan dialog positif dengan umat lintas agama, sehingga dapat menggali potensi nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalamnya melalui proses dialektika-intelektual-teologis secara bersama-sama dengan cara yang baik (Q.S. Al-Ankabut: 46).

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَجِدَّ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٤٦

Artinya: “Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri”

Sedangkan pluralitas adalah sebuah kenyataan objektif komunitas manusia. Sebagaimana Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Realisasi ini, Allah menegur keras Nabi Muhammad ketika ia memiliki keinginan yang kuat untuk memaksa manusia menerima dan mengikuti ajaran yang disampaikannya. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Al quran:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩

Artinya: “ Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya” (Q.S. At-Taubat: 99).

### Pluralitas dan Multikultural dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah piagam pertama dalam sejarah peradaban Islam yang menyepakati soal-soal hubungan atau interaksi

sosial antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan agama dan budaya, yakni antara kelompok Yahudi, Nasrani dan Muslim.<sup>8</sup> Di sini, Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pencetus dan mediator dalam gerakan ishlah ini. Hal-hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar interaksi sosial di tengah komunitas yang plural dan multi kultural antara lain:

1. Seluruh suku yang ada di madinah disebut dalam pasal-pasal piagam dengan maksud menghormati identitas kolektivitas keagamaan dan etnik yang ada dalam masyarakat tersebut.
2. Tiap-tiap kelompok etnik dan keagamaan dijamin otonomi hukum dan budayanya secara total.
3. Secara garis besar piagam madinah memuat kesepakatan antara Muhammad, kaum musyrik, dan Yahudi. Dari 47 pasal yang termuat dalam piagam itu meliputi masalah monoteisme, persatuan-kesatuan, persamaan hak, keadilan, kebebasan beragama, bela negara, pelestarian adat, perdamaian dan proteksi.
4. Masing-masing berkewajiban menjaga keamanan dan stabilitas Madinah.
5. Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam memiliki kepedulian tinggi terhadap kesetaraan antaretnis dan ras. Dari sudut

tinjauan modern, ia diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang majemuk.

6. Piagam Madinah menjadi bukti bagi kerja sama kaum muslimin dengan kelompok beragama lain, sekaligus menunjukkan bahwa Muhammad telah melembagakan asas toleransi beragama yang dinyatakan dalam al-Quran (Q.S al-Baqarah: 156, al-Maidah: 48, dan al-Kafirun: 6).
7. Piagam Madinah menjadi piagam pertama yang mengakui kebebasan hati nurani yang ditemui dalam sejarah umat manusia.

### **Pengembangan spirit Nilai-nilai Pluralisme dan Multikultural**

Sudah menjadi sunatullah, bahwa manusia diciptakan sebagai masyarakat sosial (*human society*), dengan berbagai perbedaan - jenis kelamin, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bahkan agama dan keyakinan yang beragam, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat; 13 diatas, Imama Al-Thabary (w.310 H) meriwayatkan bahwa Rasulullah saw dalam suatu khutbahnya ketika di Arafah;

يَأَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا  
لأفضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب  
ولا لاسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا  
بالتقوى الا هل بلغت؟ قالوا نعم فليبلغ الشاهد الغائب  
(الحديث)

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu itu satu, dan sesungguhnya ayahmu sekalian itu satu, ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab melebihi orang Ajam (non Arab) dan tidak ada keutamaan bagi orang Ajam melebihi orang Arab, dan juga tidak ada keutamaan bagi orang kulit hitam melebihi orang kulit merah, dan tidak ada keutamaan bagi orang kulit merah melebihi orang kulit hitam kecuali karena taqwa. Ingat, sudahkah aku menyampaikan hal ini?, Mereka menjawab, Iya. Rasulullah bersabda : yang hadir di sini agar menyampaikan kepada yang tidak hadir.

Secara tekstual, Ayat dan Hadits diatas merupakan salah satu dari doktrin agama, yang kurang mendapatkan perhatian sebagai bagian dari kajian ilmu akhlaq, karena dianggap sebagai ilmu social yang tidak ada kaitannya dengan doktrin agama. Hal ini merupakan sikap yang a-priori terhadap ilmu social, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan doktrin agama yang berimplikasi halal, haram, wajib, sunnah, makruh dan mubah. mestinya ayat dan hadits tersebut dilihat konteksnya, apa manfaat dan maslahat yang biasa dipetik dalam upaya merajut keragaman budaya, suku, ras, pluralitas agama, yang difahami secara jadikan kibatkan oleh faham-faham fundamentalis-teologis, kapitalis dan kaum fanatis-egoistis hidonesm.

Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa risalah telah mencanangkan kesadaran akan kesetaraan (المساواة) dan semangat persatuan dan kebersamaan dengan mencetuskan “Piagam Madinah”, selain *Baiatu*

*al-‘Aqabah I* yang terjadi pada tahun 621 M dan *Baiatu al-‘Aqabah II* pada tahun 622 M., memberikan jaminan kebebasan beragama dan perlindungan terhadap seluruh tumpah darah warga Negara, baik Muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi dan bahkan kaum Musyrik sekalipun.<sup>9</sup> Multikulturalisme pada dasarnya merupakan konsep yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dengan mengakomodir dan sekaligus mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, ras, agama, bahasa, dan tradisi, yang dapat hidup berdampingan, saling menghormati dalam suasana damai dan rukun dalam membangun masyarakat madani.

Akar-akar nilai karakter inklusif mendorong terwujudnya budaya pluralis-multikulturalis dalam suatu masyarakat atau bangsa, salah satu diantaranya (saling mengenal) yang merupakan pintu gerbang proses interaksi antar individu dan atau kelompok, tanpa kendala perbedaan warna kulit, budaya, agama, atau bahasa. Menurut KH. Tholchah Hasan bahwa akar nilai-nilai multikultural antara lain: 1) *التعارف* (interaksi), 2) *التوسط* (moderat), 3) *التسامح* (toleransi), 4) *التعاون* (koperatif), 5) *التوازن* (harmoni).<sup>10</sup> lebih spesifik Prof. Azyumardi Azra menyatakan bahwa “Indonesia wasathiyah : *Islam with smiling face is too big to fail*” menjadi distingsi “Islam Nusantara” yang paling

sempurna, karena sifatnya yang inklusif, akomodatif, toleran, dan dapat hidup berdampingan secara damai dengan umat lain.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Abdullah Aly, nilai inti dari pendidikan multikultural ada 7 (tujuh), yaitu: 1. Kesetaraan, 2. Keadilan, 3. Demokrasi, 4. Kemanusiaan, 5. Kebersamaan (solidaritas), 6. Kedamaian (saling mengasihi dan memaafkan), 7. Toleransi (mengakui, menerima, dan menghargai keragaman).<sup>12</sup>

Pendidikan Multikultural mengangkat nilai-nilai yang berasal dari prinsip hak asasi manusia (*human right*) dan nilai martabat manusia (*human dignity*), keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Maksudnya adalah mengajari generasi muda untuk menghargai dan menerima pluralisme etnis, menyadari bahwa perbedaan budaya tidak sama dengan kekurangan atau rendah diri, dan untuk mengakui bahwa keragaman merupakan bagian integral dari kondisi manusia. Pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai itu tidak dapat dielakkan dalam masyarakat pluralistik dan bahwa konflik tidak harus menghancurkan dan memecah belah. Jika kita mengelola dengan baik hal itu akan dapat menjadi katalis kemajuan sosial dan ada kekuatan dalam pluralisme etnis dan budaya; bahwa kesetiaan etnis dan loyalitas nasional bukan tidak dapat didamaikan; dan bahwa kerja sama dan koalisi

di antara kelompok etnis tidak tergantung pada pemilikan keyakinan, nilai, dan perilaku yang sama. menganalisa dan mengklarifikasi sikap dan nilai etnis merupakan langkah kunci dalam proses melepaskan potensi kreatif individu untuk memperbarui diri dan masyarakat.<sup>13</sup>

Mc. Cormick (1983) dalam bukunya yang berjudul *Multikulturalisme: Some Principles and Issues, Theory into Practice*,<sup>14</sup> menyebutkan ada empat model multikulturalisme dalam konteks pembentukan suatu bangsa, yaitu: *Pertama*, “*Melting Pot*”, adalah peleburan etnisitas dan budaya menjadi sebuah bangsa baru, sehingga cirri-ciri etnisitas dan budaya lama yang membentuk kesatuan bangsa itu menjadi hilang.

*Kedua*, “*Asimilation*”, yaitu suatu pandangan yang membenarkan eliminasi perbedaan-perbedaan yang ada melebur dengan budaya-kelompok yang dominan. Biasanya warna budaya kelompok dominan tersebut yang masih mudah dikenali meskipun sudah berkurang, sebaliknya budaya kelompok yang lemah akan menjadi kabur dan hilang.

*Ketiga*, “*Salad Bowl*”, yang memandang keharusan setiap individu atau kelompok dalam suatu masyarakat harus menghormati keragaman cultural (*cultural diversity*) yang berasal dari perbedaan etnis, budaya, agama, bahasa, dan wilayah dimana individu dan kelompok berasal. Dan pada saat yang sama mendukung

kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk bersatu dan saling menghormati dalam satu wadah dan hidup berdampingan secara damai.

*Keempat*, “*Open Nation*”, suatu pandangan masyarakat terbuka, masyarakat dengan segala keberagamannya dibebaskan mengambil cara yang dikehendaki dalam membentuk suatu bangsa.<sup>15</sup>

Jauh sebelum menjadi sebuah negara-bangsa (*nation state*), Indonsia merupakan himpunan dari ribuan pulau – 13.000 pulau besar dan kecil- dan masing-masing memiliki bahasa – hamper 200 bahasa-, budaya, etnik, ras, suku –tidak kurang dari 3000 suku- dan bahkan agama – Hindu, Buhda, Islam, Katolik, Kristen, Konhucu - yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Fenomena ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari, ditutup-tutupi dan apalagi direduksi. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multicultural dengan model “*Salad Bowl*” yang merupakan sunnatu Allahi, sebagaimana FirmanNya yang berbunyi:

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat (QS. Hud ayat 118).

... dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan (QS al-Nahl 93).

... dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek (QS al-Kahfi ayat 29).

Selain itu, hadits Nabi tentang seruan persaudaraan yang universal juga menegaskan:

إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

Artinya: Sayangilah orang yang ada di bumi maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu.

Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama satu dengan lainnya, sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton), maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.

Dalam konsep pluralisme-multikulturalisme, terdapat kaitan erat bagi

pembentukan masyarakat yang berlandaskan « Bhineka Tunggal Ika » serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.

Berbeda dengan Mc.Cormick dan Bhiku Parekh<sup>16</sup> mensarikan model multikulturalisme menjadi lima: *Pertama*, “*Isolationic multiculturalism*”, yang mengacu dimana kelompok cultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lainnya, Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan mereka secara terpisah dari masyarakat lain.

*Kedua*, “*acomodative multiculturalism*”, yaitu masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan cultural kaum minoritas. Masyarakat multicultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hokum dan peraturan-peraturan yang sensitive secara cultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya mereka. Sebaliknya kaum minoritas tidak menentang kultur kaum dominan.

*Ketiga*, “*otonomic multiculturalism*”, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok

cultural berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan. *Concern* pokok kelompok-kelompok cultural ini adalah mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka bahkan menantang kelompok cultural dominan dan berusaha menciptakan masyarakat dimana semua kelompok bias eksis sebagai mitra sejajar.

Keempat, “*critical multiculturalism*”, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok cultural tidak terlalu concern dengan kehidupan cultural otonom, tetapi mereka lebih menuntut terciptanya kultur kolektif yang menegaskan perspektif distingtif mereka. Kelompok cultural dominan cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok minoritas. Sebaliknya kelompok minoritas terus menentang kelompok dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim kondusif bagi penciptaan secara bersama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter.

*Kelima*, “*cosmopolitan multiculturalism*”, yang berusaha menghapus batas-batas cultural sama sekali untuk menciptakan masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu, dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen intelektual dan sekaligus

mengembangkan kehidupan cultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme model ini memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih secara bebas.<sup>17</sup>

Dalam konteks pembagian multikulturalisme Parekh ini- untuk menjembatani kelompok mayoritas dan minoritas-perlu diperhatikan tiga hal penting, yaitu sebagai “deskripsi faktual” dari masyarakat, preskripsi normatif dan kebijakan pragmatis. Pertama, sebagai “deskripsi faktual” dari masyarakat, yaitu menggambarkan sudah adanya terbangun pluralisme kultural, yakni setiap individu saling berinteraksi dan berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kekhasan kultural dengan nilai dan praktek yang berbeda-beda yang diikat dan tinggal bersama pada satu wilayah. Kedua, sebagai “praskripsi normatif”, multikulturalisme menunjukkan bagaimana seharusnya menyikapi dan mengorganisir keberagaman kelompok kultural dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan dapat berbentuk politik perbedaan, politik identitas atau politik pengakuan. Identitas kelompok yang berbeda-beda bukanlah sesuatu yang harus direduksi atau dihilangkan. Namun, keberagaman identitas kelompok yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang memang berbeda. Ketiga, sebagai “kebijakan pragmatis”, yakni multikulturalisme menjadi bahan acuan untuk

kebijakan pemerintah dalam menyikapi keberagaman kelompok masyarakat, seperti: melaksanakan kegiatan untuk mengenal berbagai bahasa etnis yang ada, mengizinkan penggunaan atribut dan keagamaan, mensubsidi festival-festival berbagai etnis dan sebagainya (Parekh: ). Dengan melaksanakan ketiga aspek di atas, setiap individu dalam kultur apa pun akan memperoleh keadilan, meskipun hidup dalam kultur yang beragam.

Dan akhirnya keragaman ini mendapatkan legalisasi teologis, karena Tuhanlah yang mempersembahkan keragaman tersebut, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertawa diantara kamu. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Hujuran: 13). Dengan demikian keragaman atau kemajemukan sesuatu yang tak bisa diingkari, karenanya pula pluralisme-multikulturalisme sebagai pengakuan atas keberagaman merupakan hal yang niscaya. Sebaliknya, tidak ada satu Negara pun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal. Dengan demikian, pluralisme-multikulturalisme merupakan sunnatullah yang tidak dapat ditolak bagi setiap negara-bangsa di dunia ini.<sup>18</sup>

Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia adalah fenomena lahirnya sebuah Negara yang didasari gerakan nasionalisme yang mengkrstal dari etnik dan budaya yang ada oleh para stake holder nasionalis, tokoh agama, culturalis yang tersebar diseluruh kepulauan Nusantara untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Manusia itu pada dasarnya berasal dari satu bapak dan ibu – Nabi Adam dan Siti Hawa- dan kemudian mengalami evolusi berdasarkan karakternya masing-masing, namun persatuan yang diajarkan itu tidak melebur perbedaan, akan tetapi tetap menghormati perbedaan: karena setiap kelompok telah memilih jalan dan tatanan hidup mereka, sehingga mereka harus berpacu *mencapai* prestasi kebajikan.<sup>19</sup>

Kesadaran untuk merajut dan menjaga hidup harmoni antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara daapat dilakukan berbagai hal, misalnya dengan cara toleransi (Tasamuh), kemerdekaan (churriyah), keutamaan (fadlilah), keadilan (al-adlu), memenuhi janji (al-wafa' bil 'ahdi), tolong menolong (ta'awun) dalam menebar kebaikan dan mencegah kerusakan

dengan menjaga eksistensi jiwa, agama , keturunan, kecerdasan, dan harta milik.

## Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Islam Nusantara adalah merupakan kekhasan Islam di Indoensia, yang identik dengan kearifan identitas lokal nusantara yang ramah, santun, terbuka, dan inklusif. Islam nusantara merupakan gabungan nilai teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di Tanah Air yang secara praktis dapat menjadi solusi terhadap ketegangan konflik agama di dunia. Karakter Islam Nusantara menunjukkan adanya kearifan lokal di Nusantara yang tidak melanggar ajaran Islam, namun justru menyinergikan ajaran Islam ajaran Islam dengan adat istiadat lokal yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lahirnya istilah Islam Nusantara berawal dari proses akumulasi antara Islam dengan adat istiadat dan tradisi lokal Indonesia sebagai identitas bangsa, sehingga kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan forman dan non-formal (seperti pasantren) serta sistem kesultanan. Dalam konteks inilah, pergumulan nilai-nilai agama dan budaya yang berlangsung sangat panjang dengan berbagai dimensi historisnya, kemudian memunculkan gagasan tentang perlunya kekhasan Islam di Indoensia yang

selanjutnya disebut sebagai Islam Nusantara; yaitu Islam yang telah melebur dengan tradisi dan budaya lokal Nusantara.

Melihat konstelasi bangsa saat ini, di mana intensitas ketegangan antar kelompok agama semakin meningkat, maka pemahaman tentang formulasi Islam Nusantara menjadi sangat penting untuk memetakan identitas Islam di negeri ini yang pada akhirnya dapat menjadi solusi tersendiri bagi kemajemukan budaya dan pluralisme agama di Indonesia. Dalam konteks ke Indonesiaan, Islam Nusantara dimaksudkan sebagai sebuah pemahaman keislaman yang bergumul, berdialog dan menyatu dengan kebudayaan Nusantara, dengan melalui proses seleksi, akulturasi dan adaptasi. Islam Nusantara tidak hanya terbatas pada sejarah atau lokalitas Islam di tanah Jawa. Lebih dari itu, Islam Nusantara sebagai *manhaj* atau model beragama yang perlu diperjuangkan untuk membangun peradaban Indonesia dan dunia yang damai di masa depan.

Sedangkan pluralisme dapat dipahami sebagai kesadaran objektif tentang realitas keragaman kehidupan masyarakat dalam aspek budaya, sosial, politik, ekonomi, ideologi, dan agama. Dalam konteks ke Indonesiaan, konsep pluralisme sebenarnya lebih dipahami sebagai kesadaran terhadap kenyataan adanya keragaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk yang selanjutnya diikat oleh prinsip kebhinnekaan dalam koridor ikatan

keadaban. Pada prinsipnya, penggunaan istilah pluralisme dan multikultural tidak ada perbedaan yang signifikan, keduanya digunakan secara bersamaan, dan bergantung pada konteks dan kebutuhan penggunaannya. Secara operasional, terdapat beberapa nilai penting dalam realisasi pluralism-multikultural dalam pendidikan, yaitu, 1). Kestaraan, 2). Keadilan, 3). Demokrasi, 4). Kemanusiaan, 5). Kebersamaan (solidaritas), 6). Kedamaian (saling mengasihi dan memaafkan), 7). Toleransi (mengakui, menerima, dan menghargai keragaman). Kesemua nilai-nilai tersebut merupakan adopsi dari prinsip hak asasi manusia (*human right*) dan nilai martabat manusia (*human dignity*), keadilan, persamaan, kebebasan, dan demokrasi.

Sementara itu, terdapat empat model pendidikan multikulturalisme yang dapat diaplikasikan dalam upaya membentuk suatu bangsa, yaitu: 1). *Melting Pot* (peleburan etnisitas dan budaya), 2). *Asimilation*, (peleburan budaya-kelompok dominan), 3). *Salad Bowl* (sikap saling menghormati keragaman cultural (*cultural diversity*)) yang berasal dari perbedaan etnis, budaya, agama, bahasa, dan wilayah asal), 4). *Open Nation* (masyarakat terbuka dan kebebasan berkeputusan dalam keragaman).

### Daftar Rujukan

Abdullah Aly' *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: telaah terhadap kurikulum pesantren modern islam assalaam Surakarta,*

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ahmad Shonhaji, *Membangun Peradaban Bangsa dalam Perspektif Multikultural, Potensi Indonesia Menjadi Negara Besar*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2015.
- Ahmad Sahal dan Munawir Aziz (editor), *Islam Nusantara; Dari Ushul Fiqh hingga Faham Kebangsaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka Dalam Ber-Agama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Andre Ata Ujan, Benyamin Molan, Nugroho ST, *Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta Barat: PT. Indeks, cet. III, 2011.
- Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Islam Indonesia: Ortodoks dan Tradisi*, Makalah untuk Orientasi Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana UNISMA, tanggal 18 September 2015.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1999.
- Bhiku Parekh, *Retinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014.
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: 2010.
- Banks, James and Cherry Mc.Gee Banks, *Multicultural Education Issues and Perspectives*. New York: John Wiley and Sons. eds. 2001.
- Banks, J.A.. *Teaching strategies for the social studies*. New York: Longman, 1985.
- Chaedar Alwasilah. A. *Islam, Culture, and Education; Essays on Contemporary Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* Cetakan VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Depag Ri.. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Badan Penterjemah Al-qur'an, 1989.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, 1994.
- Huitt W, Value: *Educational Psychology Interactive* (Valdosta GA: Valdosta State University, 2004).
- Marc Howard Ross. 1993. *The Culture of Conflict: Interpretations and Interest in Comparative Perspective*. US: Yale University Press.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Maarif, Syamsul. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2005.
- M. Syafi'i Anwar. *Pemikiran dan Aksi Islam IMasgnud, Pendidikan Multikultural: Pemikiran dan Upaya Implementasinya*, Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, Bandung : Bumi Aksara, 2006.
- Soetopo, H. 2011, *Manajemen Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Tilaar. H.A. R, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT. Grasindo, 2004.
- W. Huitt, Value: *Educational Psychology Interactive* (Valdosta GA: Valdosta State University, 2004).
- Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Bandung : Alfabeta : 2007.

### (Endnotes)

<sup>1</sup> Untuk penyebutan istilah Nusantara, lihat di Ki Hajar Dewantara (1889-1959) tentang Nusantara (Tilaar. H.A. R, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT. Grasindo, 2004.

<sup>2</sup> Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015. Hal. 27.)

<sup>3</sup> Soetopo, H. 2011, *Manajemen Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang. Hal 45.

<sup>4</sup> M. Syafi'i Anwar. *Pemikiran dan Aksi Islam IMasgnud, Pendidikan Multikultural: Pemikiran dan Upaya*

*Implementasinya*, Yogyakarta: Idea Press, 2010. hal. 23.

<sup>5</sup> Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: 2010.

<sup>6</sup> Oxford Advanced Learner's Dictionary 2000

<sup>7</sup> (Syamsul Ma'arif: 2005)

<sup>8</sup> M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005. Hal. 51.

<sup>9</sup> Zaim Elmubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Bandung : Alfabeta : 2007. Dan Zainuddin (2016). hal. 107.

<sup>10</sup> ) Ahmad Shonhaji, *Membangun Peradaban Bangsa dalam Perspektif Multikultural, Potensi Indonesia Menjadi Negara Besar*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2015. (Hasan: 2015) hal. 23.

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Islam Indonesia: Ortodoks dan Tradisi*, Makalah untuk Orientasi Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana UNISMA, tanggal 18 September 2015, hal. 5-8.

<sup>12</sup> Abdullah Aly' *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren: telaah terhadap kurikulum pesantren modern islam assalaam Surakarta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hal 45.

<sup>13</sup> Ibid. Hal. 56.

<sup>14</sup> Banks, J.A.. *Teaching strategies for the social studies*. New York: Longman, 1985. dan Banks, James and Cherry Mc.Gee Banks, *Multicultural Education Issues and Perspectives*. New York: John Wiley and Sons. eds. 2001. hal. 139.

<sup>15</sup> Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*, Bandung : Bumi Aksara, 2006. Hal. 34.

<sup>16</sup> Bhiku Parekh. *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014. Hal. 28.

<sup>17</sup> (Hasan: 2015)

<sup>18</sup> Chaedar Alwasilah. A. *Islam, Culture, and Education; Essays on Contemporary Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014. Hal. 98.

<sup>19</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* Cetakan VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. hal. 27.